

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

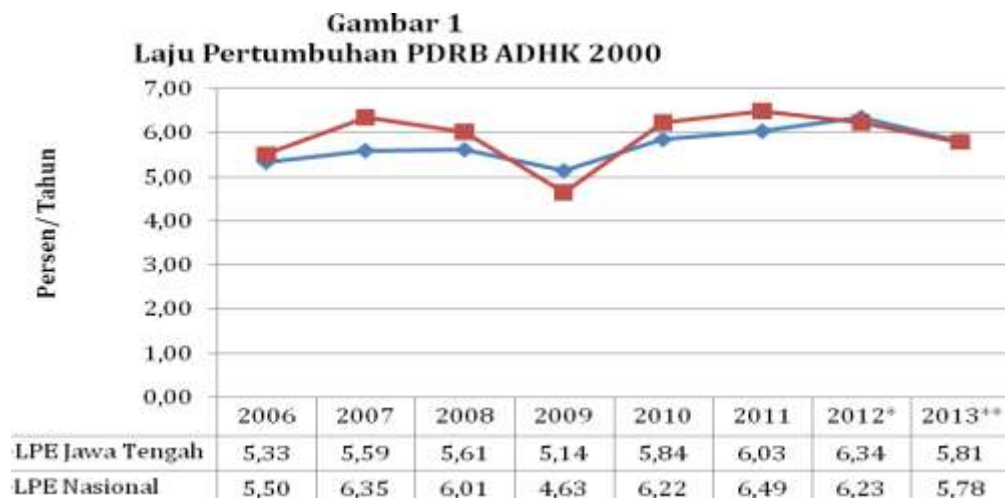
Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

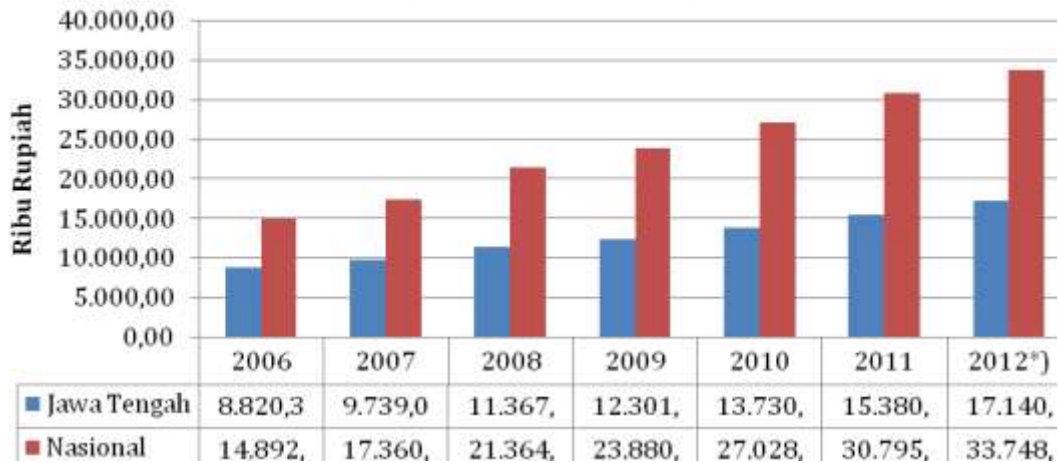
Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian di Provinsi Jawa Tengah cukup baik, terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,71 persen per tahun (Gambar 1). Dalam pembentukan output nasional, PDRB Provinsi Jawa Tengah berkontribusi sebesar 8,27 persen pada tahun 2012. Dari perspektif wilayah, kontribusi Provinsi Jawa Tengah terhadap output wilayah Jawa Bali sebesar 14,35 persen. Dari sisi besarnya, perekonomian Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga terendah di wilayah Jawa setelah DI Yogyakarta dan Banten.



Sumber: BPS, 2013

Namun demikian laju pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah dari angka rata-rata nasional. Rasio PDRB per kapita antara Provinsi Jawa Tengah dan nasional menurun dari 56,4 persen menjadi 49,3 persen selama periode 2004-2009. Dengan kenyataan bahwa laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah selama 2000-2010 relatif rendah, yaitu sebesar 0,37 persen per tahun. (lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49 persen per tahun pada periode yang sama), maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Jawa Tengah.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

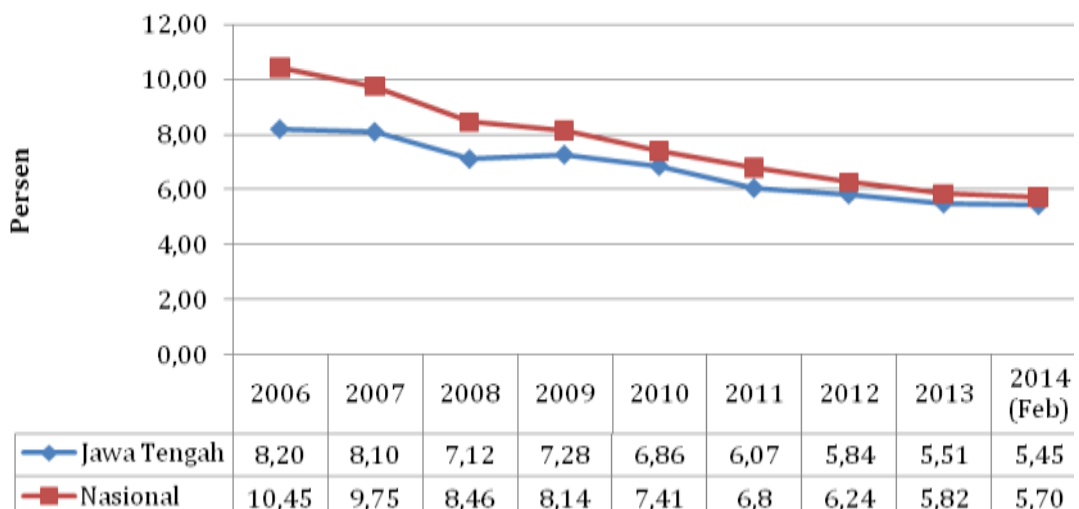


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah selama 2006-2013 berkurang sebesar 4,85 persen (Gambar 3). Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong rendah. Dengan PDRB per kapita yang relatif rendah dibandingkan nasional, kondisi ini menyiratkan perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang rendah ini mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah. Diperlukan penelusuran lebih lanjut tentang kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

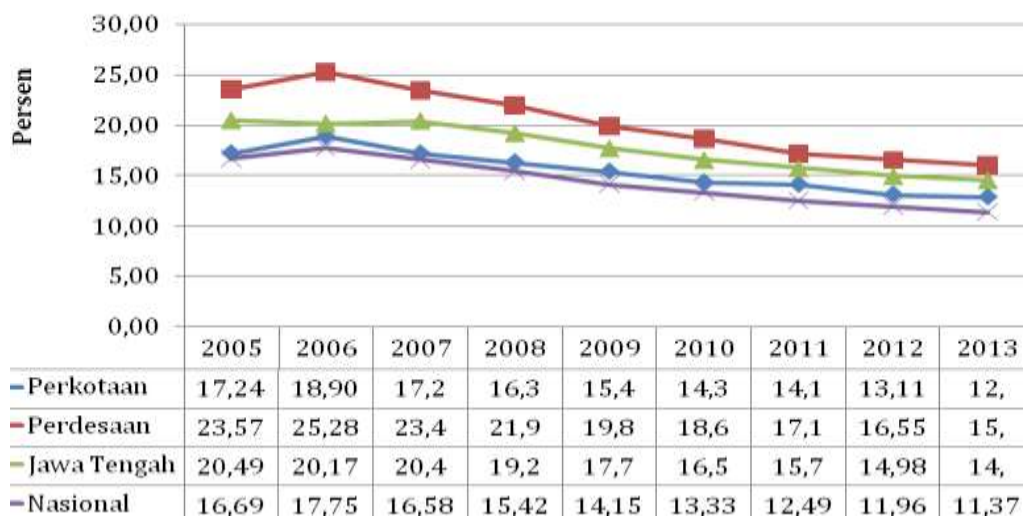


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah cenderung menurun selama periode 2006-2013, khususnya di perkotaan. Namun demikian secara nasional tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong cukup tinggi. Jika pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, maka tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih mencapai 14,56 persen. Di tingkat wilayah Jawa kondisi kemiskinan di Jawa Tengah ini merupakan yang tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta. Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan. Hal ini menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

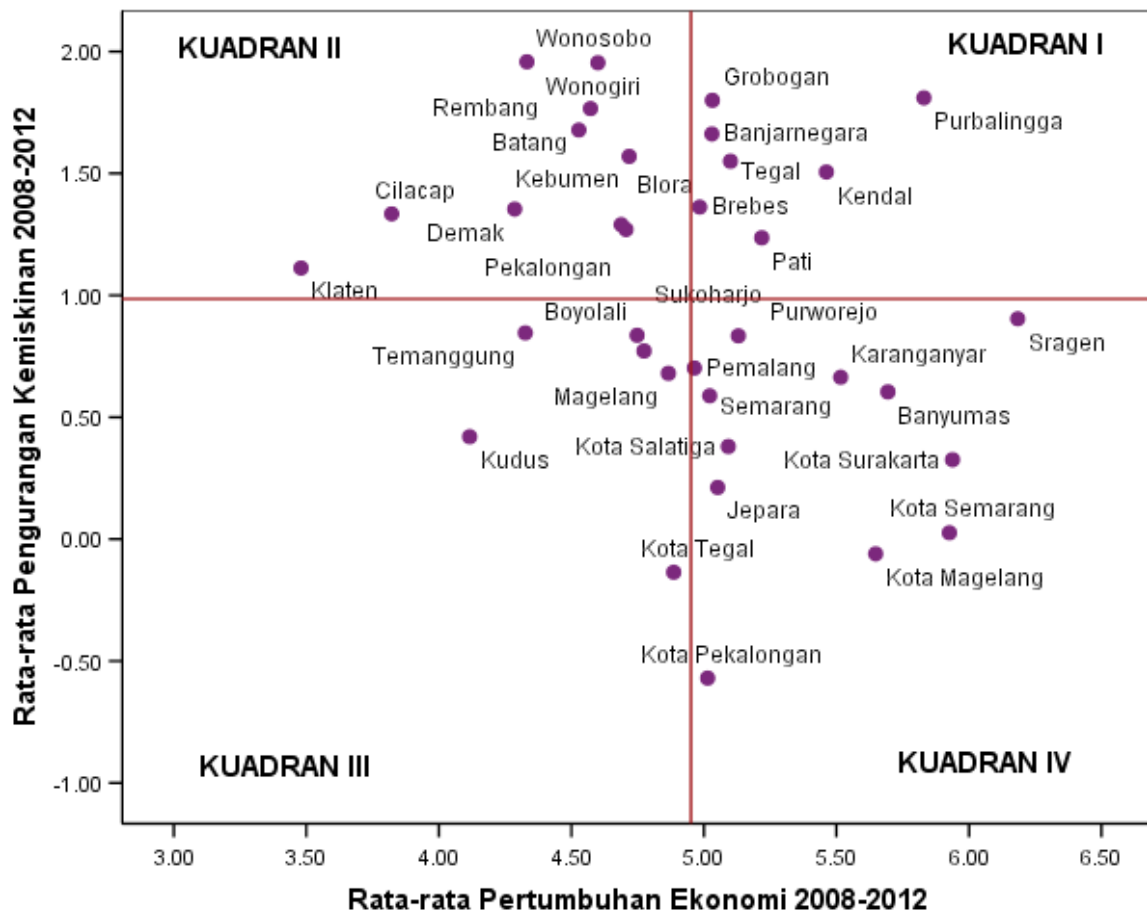
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Grobogan, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Brebes, Kendal, dan Pati termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Batang, Blora, Kebumen, Cilacap, Demak, Klaten, dan Pekalongan yang terletak di kuadran II merupakan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti industri manufaktur, pertanian, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Temanggung, Magelang, Kudus, dan Kota Tegal terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Purworejo, Karanganyar, Sragen, Banyumas, Pemalang, Semarang, Jepara, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

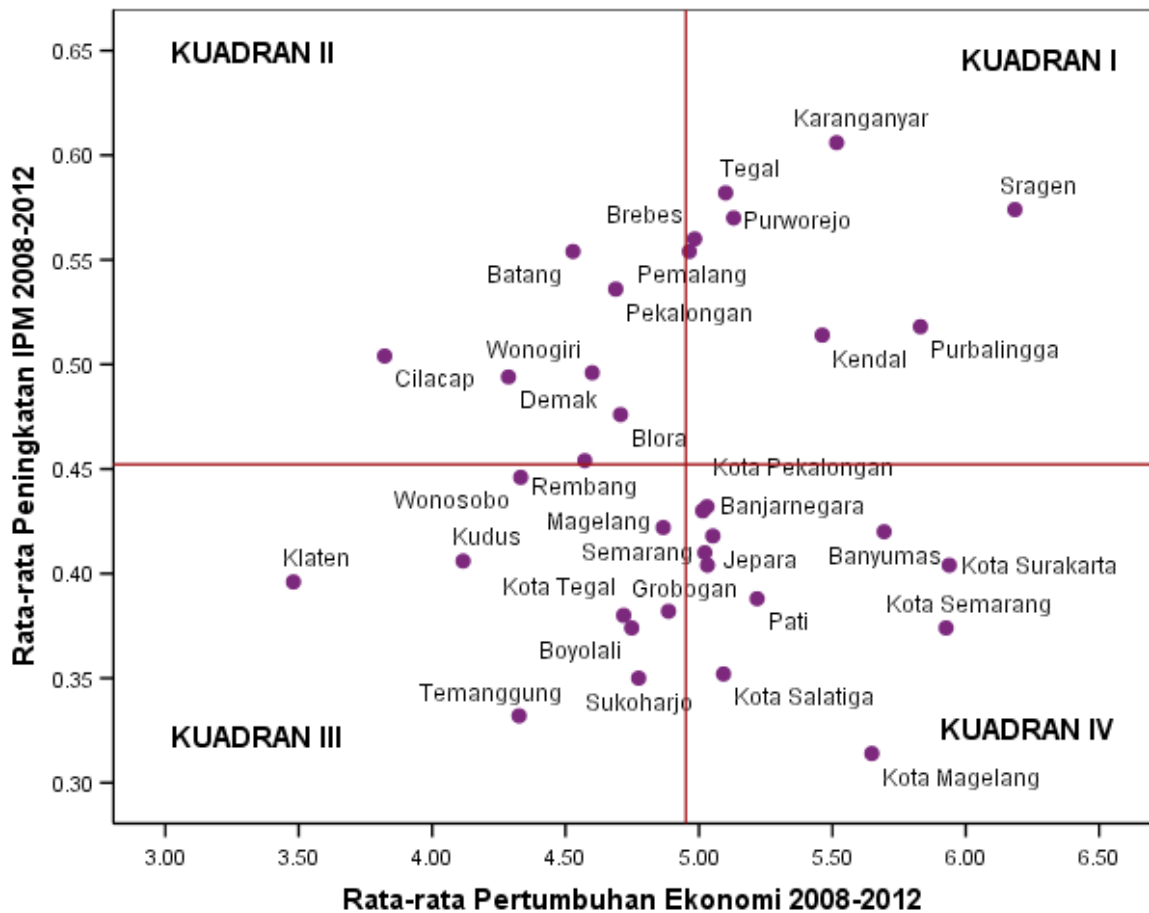
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012.

Pertama, Kabupaten Karanganyar, Sragen, Tegal, purworejo, Kendal, Purbalingga, Brebes, Pemalang terletak pada Kuadran I dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Pekalongan, Batang, Wonogiri, Cilacap, Demak, Blora, Rembang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi seperti Industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Wonosobo, Klaten, Kudus, Magelang, Grobogan, Boyolali, Sukoharjo, Temanggung, dan Kota Tegal terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

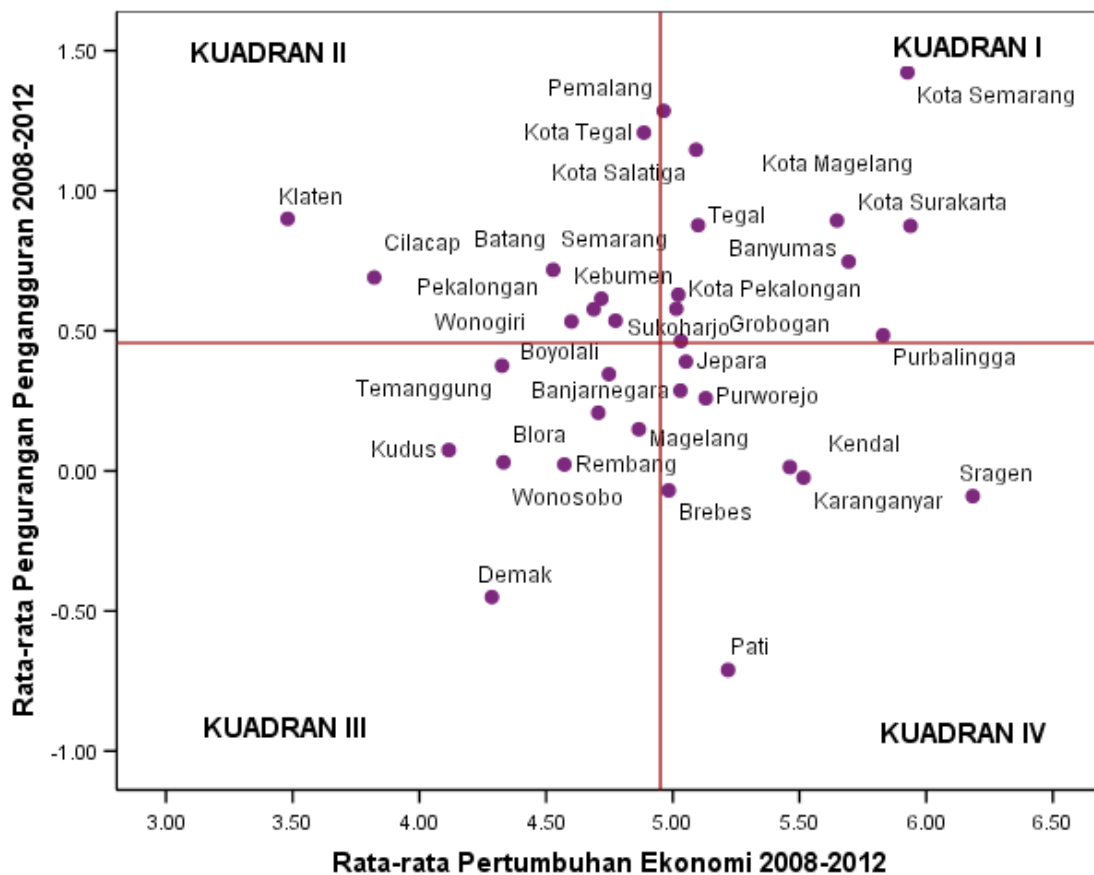
Keempat, Kabupaten Banjarnegara, Semarang, Jepara, Pati, Banyumas, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, kota Magelang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Pemalang, Purbalingga, Tegal, Banyumas, Grobogan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan dan jasa.

Kedua, Kabupaten Klaten, Cilacap, Batang, Semarang, Kebumen, Wonogiri, Sukoharjo, Kota Tegal yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

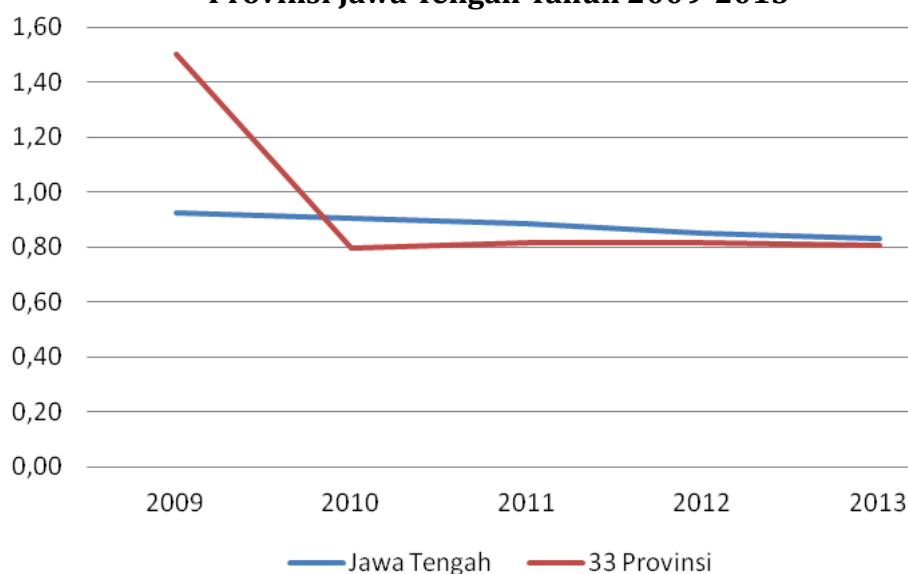
Ketiga, Kabupaten Boyolali, Temanggung, Banjarnegara, Blora, Kudus, Demak, Wonosobo, Demak, Rembang, Magelang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Jepara, Purworejo, Kendal, Karanganyar, Sragen, Pati, Brebes terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti industri pengolahan, pertanian perdagangan, jasa. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson dari tahun 2009-2013 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan kecenderungan menurun. Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah struktur perekonomian di kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang berbeda. Beberapa daerah merupakan daerah industri dan perkotaan yang cukup maju sedangkan daerah lain merupakan perdesaan yang kegiatan perekonomiannya hanya didominasi oleh pertanian. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan semakin besar.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013



Sumber: Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kesenjangan yang ditimbulkan juga relatif besar antarwilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, yang didukung oleh pengolahan industri dari hulu ke hilir. Kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi antara lain Kabupaten Cilacap dan Kudus yang dikenal dengan daerah industri. Keberadaan industri pengolahan turut meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat di daerah ini.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Cilacap	39.839	49.937	51.918	556.673	62.165	65.876
Banyumas	4.749	5.424	5.940	6.647	7.294	8.191
Purbalingga	4.666	5.299	6.116	6.795	7.671	8.570
Banjarnegara	5.458	8-391	6.949	7.712	8.557	9.431
Kebumen	3.916	4.556	5.038	5.592	6.132	6.801
Purworejo	6.645	7.618	8.388	9.302	10.257	11.296
Wonosobo	3.937	4-422	4.752	5.203	5.719	6.325
Magelang	5.040	5.634	6.082	6.787	7.412	8.215
Boyolali	6.173	8.956	7.691	8.707	9.689	10.703
Klaten	7.393	8.402	9.167	9.976	10.769	11.951
Sukoharjo	8.674	9.842	10.868	12.022	13.349	14.839
Wonogiri	4.830	5.618	6.145	7.450	7.729	8.535
Karanganyar	8.626	9.541	10.353	11.339	12.634	14.061
Sragen	5.257	6.024	6.840	7.802	8.819	9.956
Grobogan	3.499	3.974	4.411	4.966	5.449	6.135
Blora	3.797	4-387	4.815	5.391	5.860	6.383
Rembang	6.176	6.929	7.562	8.403	9.187	10.040
Pati	5.675	6.495	7.054	7.880	8.767	9.668
Kudus	31.660	35.615	37.520	40.450	43.479	47.353
Jepara	6.087	6.939	7.554	8.304	9.210	10.174
Demak	4.133	4.730	5.083	5.618	6.165	6.769
Semarang	9.034	10.160	10.913	11.888	13.235	14.812
Temanggung	5.226	5.883	6.385	7.152	7.898	8.723
Kendal	8.657	9.714	10.654	11.790	13.454	14.882
Batang	5.571	6.225	6.660	7.453	8.287	9.161
Pekalongan	6.135	7.038	7.698	8.621	9.566	10.631
Pemalang	4.559	5.197	5.676	6.313	7.014	7.732
Tegal	3.961	4.587	5.103	5.691	6.299	7.014
Brebes	5.518	6.428	7.231	8.440	9.461	10.736
Kota Magelang	12.584	14.174	15.741	17.807	19.620	22.065
Kota Surakarta	13.848	15.832	17.788	11.911	21.985	24.345
Kota Salatiga	8.239	9.230	9.842	10.848	11.897	13.088

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Kota Semarang	20.360	22.750	25.011	27.866	31.102	34.788
Kota Pekalongan	10.811	11.579	12.415	15.514	14.872	16.425
Kota Tegal	7.818	8.937	9.970	10.998	11.866	12.837
JAWA TENGAH	9.739	11.367	12.302	13.730	15.381	17.140

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sektor Primer, Khususnya Pertanian

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 didominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sementara itu peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah (Tabel 2). Pangsa sektor konstruksi, angkutan dan komunikasi hanya sekitar 6 persen dalam PDRB, diikuti sektor utilitas (listrik, gas, air) sebesar 1,06 persen. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap pembentukan nilai PDRB wilayah dan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 36 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian. Namun untuk sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB hanya menyerap sebesar 18,22 persen (sektor industri) dan 20,92 persen (sektor perdagangan) dari jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	18.30	16.81
2.	Pertambangan	0.96	1.12
3.	Industri Pengolahan	32.56	32.76
4.	Listrik, Gas, Air Minum	1.06	0.88
5.	Konstruksi	5.96	6.03
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	20.73	22.51
7.	Angkutan, Telekomunikasi	6.03	5.49
8.	Keuangan	3.73	4.07
9.	Jasa-jasa	10.67	10.33
		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Kuatnya peran ketiga sektor (industri pengolahan, perdagangan dan pertanian) dalam perekonomian daerah juga bisa dilihat dari analisis sektor basis (Tabel 3). Di antara sektor-sektor perekonomian Jawa Tengah, sektor industri pengolahan yang meliputi subsektor industri migas (pengilangan minyak bumi) dan subsektor industri non-migas (makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, barang kulit dan alas kaki, barang kayu dan hasil hutan lainnya, semen dan barang galian bukan logam), sektor perdagangan yang meliputi subsektor perdagangan besar dan eceran, serta restoran, dan sektor pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan dan peternakan, memiliki nilai *Location Quotient*

(LQ) lebih besar dari satu. Hal ini menunjukkan Jawa Tengah memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,43	1,42	1,42	1,40	1,39
a. Tanaman Bahan Makanan	2,02	1,98	2,01	1,98	1,99
b. Tanaman Perkebunan	0,85	0,88	0,83	0,83	0,81
c. Peternakan	1,45	1,48	1,51	1,52	1,51
d. Kehutanan	0,42	0,42	0,45	0,47	0,46
e. Perikanan	0,53	0,50	0,47	0,46	0,46
2. Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	1,12	1,10	1,11	1,09	1,09
3. Industri Pengolahan	1,23	1,24	1,27	1,28	1,28
a. Industri Migas	2,78	2,74	2,82	2,91	2,99
1). Pengilangan Minyak Bumi	6,32	6,10	6,23	6,35	6,45
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	1,08	1,11	1,14	1,15	1,15
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,16	1,07	1,11	1,13	1,13
a. Listrik	1,59	1,56	1,61	1,59	1,56
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,94	0,95	0,94	0,95	0,97
5. Konstruksi	0,91	0,91	0,91	0,92	0,91
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,20	1,26	1,24	1,23	1,23
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,20	1,29	1,26	1,24	1,23
b. Hotel	0,55	0,54	0,54	0,52	0,50
c. Restoran	1,37	1,32	1,34	1,38	1,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,64	0,59	0,56	0,55	0,54
a. Pengangkutan	1,06	1,04	1,02	1,02	1,03
1). Angkutan Rel	1,99	1,96	1,98	2,16	2,22
2). Angkutan Jalan Raya	1,96	1,94	1,95	1,97	1,99
3). Angkutan Laut	0,97	1,03	1,09	1,09	1,05
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
b. Komunikasi	0,30	0,27	0,26	0,26	0,25
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40
a. Bank	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,66	0,61	0,61	0,60	0,63
c. Jasa Penunjang Keuangan	1,41	1,45	1,48	1,46	1,54

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
d. Real Estat	0,85	0,87	0,86	0,86	0,88
e. Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
9. Jasa-jasa	1,08	1,06	1,08	1,09	1,11
a. Pemerintahan Umum	1,95	1,93	2,00	2,06	2,17
b. Swasta	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014, sektor industri pengolahan dan bangunan mampu menyerap tenaga kerja yang besar dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor bangunan.

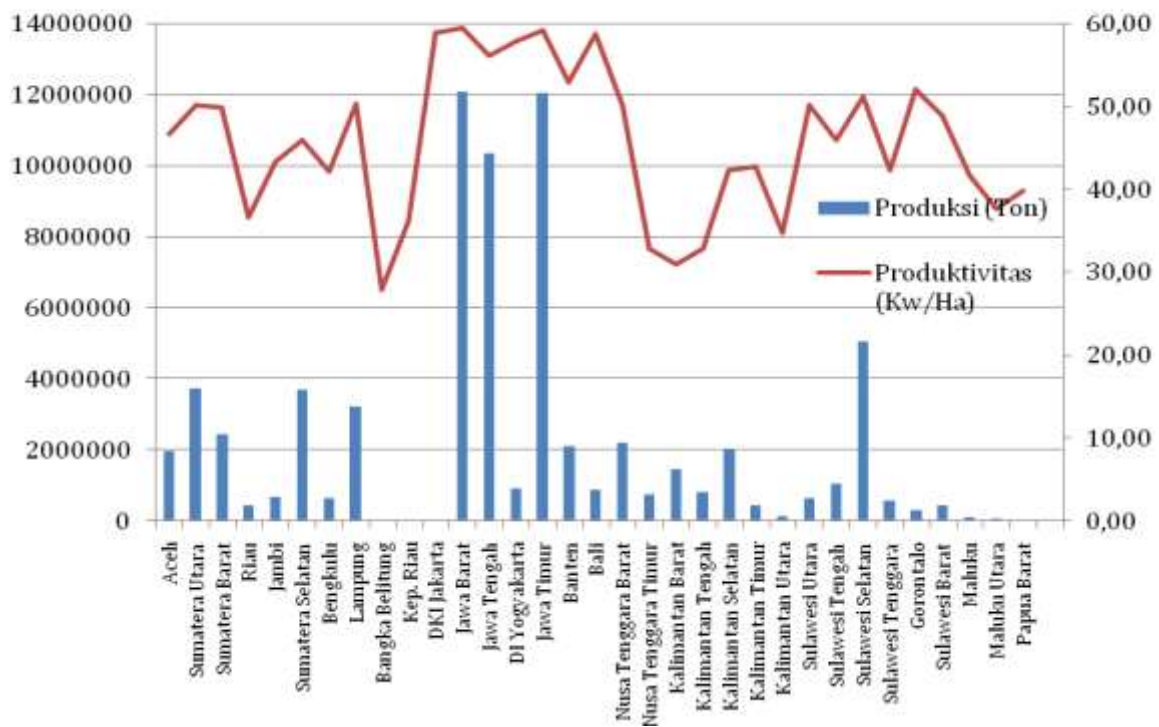
Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	6.031.398	5.190.613	-840.785
2	Pertambangan	88.982	124.306	35.324
3	Industri Pengolahan	2.765.679	3.313.028	547.349
4	Listrik, Gas, Air	20.487	39.144	18.657
5	Bangunan	768.236	1.310.327	542.091
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	3.472.748	3.722.886	250.138
7	Angkutan & Telekomunikasi	683.765	547.294	-136.471
8	Keuangan	152.041	357.966	205.925
9	Jasa-Jasa	1.972.698	2.145.411	172.713
	Total	15.956.034	16.750.975	794.941

Sumber : BPS, 2013

Salah satu peran penting Provinsi Jawa Tengah bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai lumbung pangan. Produksi padi daerah ini memiliki surplus yang berpotensi mendukung ketahanan pangan wilayah. Secara nasional Jawa Tengah termasuk penghasil padi terbesar dengan produksi mencapai 10,34 juta ton padi kering giling pada tahun 2013 (Gambar 9). Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Jawa Tengah berpotensi memiliki surplus beras sebesar 1,86 juta ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun. Sejalan dengan produksi yang tinggi, tingkat produktivitas padi di Jawa Tengah adalah sebesar 56,06 kwintal per hektar, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Mengingat peran pentingnya, lahan pertanian pangan di Jawa Tengah perlu dipertahankan dengan mengendalikan konversi lahan pertanian pangan.

Gambar 9
Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013



Sumber: BPS, 2013

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi penggunaan, peranan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB di Jawa tengah tahun 2013 sangat besar dengan pangsa sekitar 64 persen. Sektor investasi (Pembentukan Modal tetap Bruto) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi sekitar 19,3 persen (Tabel 5). Investasi berperan dalam meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	63,94	36,38
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,47	30,52
3.	Konsumsi Pemerintah	11,17	19,83
4.	PMTB	20,00	11,13
5.	Perubahan Stok	1,36	0,33
6.	Ekspor	47,67	30,53
7.	Impor	45,61	28,71
	Total	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

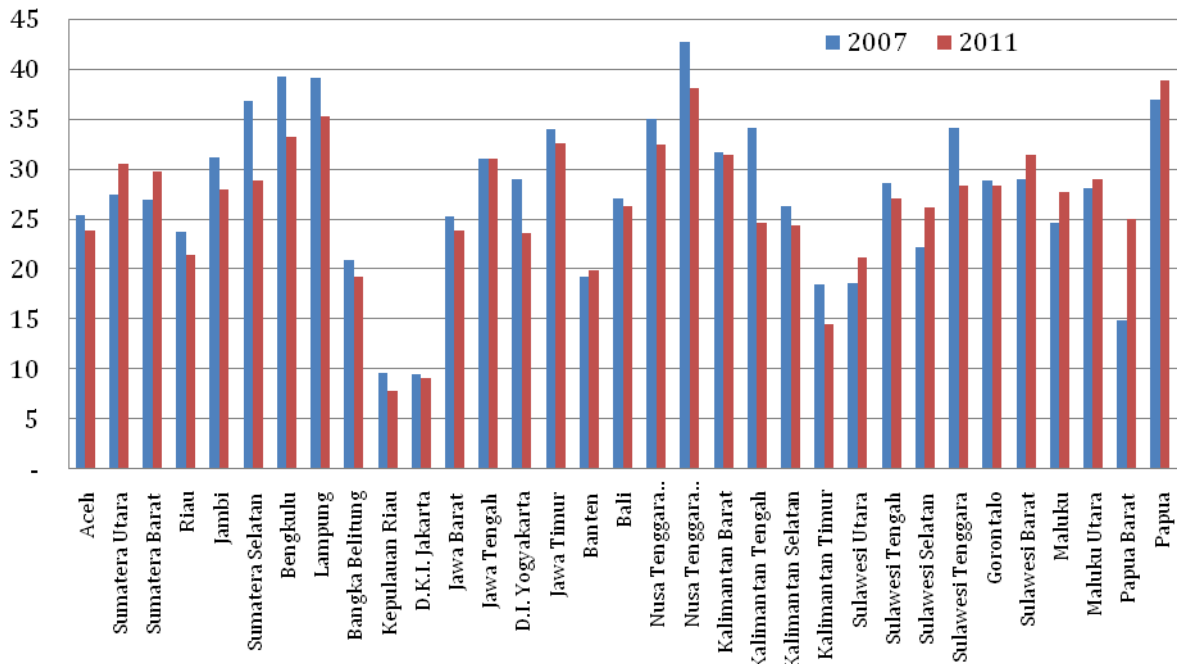
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Jawa Tengah secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah erat kaitannya dengan tingginya persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal ini bisa ditelusuri dari besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Perkembangan tingkat pekerja yang kurang berkualitas di Jawa Tengah persentasenya kurang lebih sama pada tahun 2007 dan 2011, yaitu sekitar 31 persen, namun persentase pekerjaan kurang berkualitas di Jawa Tengah berada di atas rata-rata nasional (Gambar 10). Di wilayah Jawa, Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan kedua teratas setelah Jawa Timur.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri karena rendahnya produktivitas namun terjadi penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian. Pengembangan industri yang sesuai oleh karenanya adalah industri berbasis pertanian dalam arti luas (agroindustri) yang didukung oleh rantai perdagangan (agrobisnis).

Gambar 10
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi juga membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Secara keseluruhan wilayah Jawa Tengah dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 29.110 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas sebenarnya ketersediaan jaringan jalan di Jawa Tengah cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator kepadatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen, angka kepadatan jalan (*road density*) di wilayah ini lebih tinggi dari angka nasional (Tabel 6).

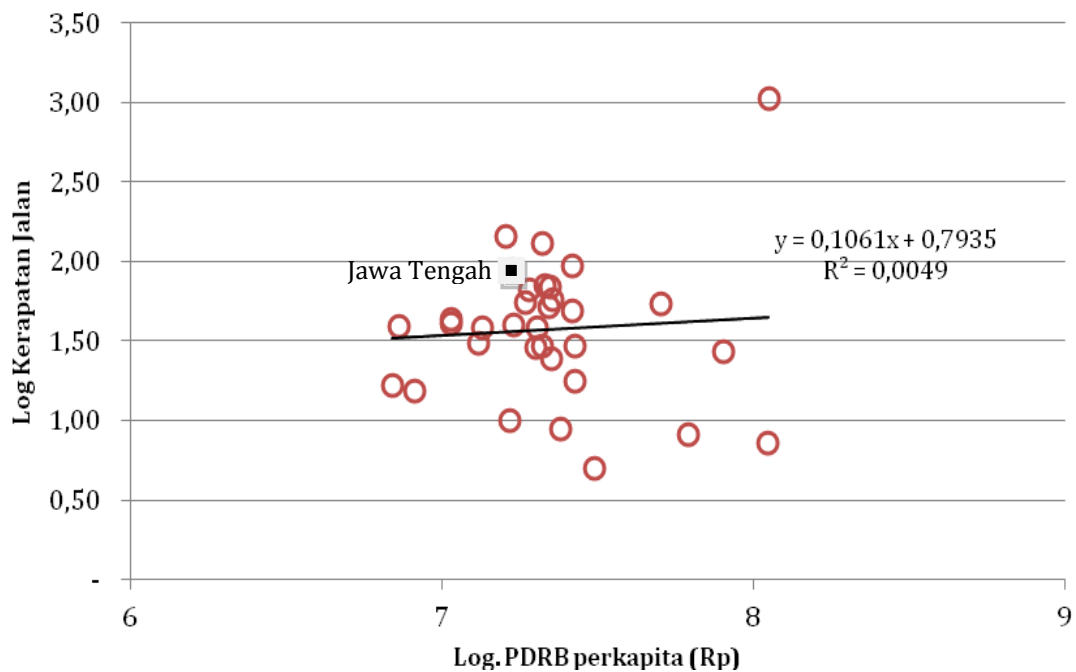
Tabel 6
Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kepadatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Gambar 11
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita setara. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia terlihat hubungan positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 11). Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain pada tahun 2012.

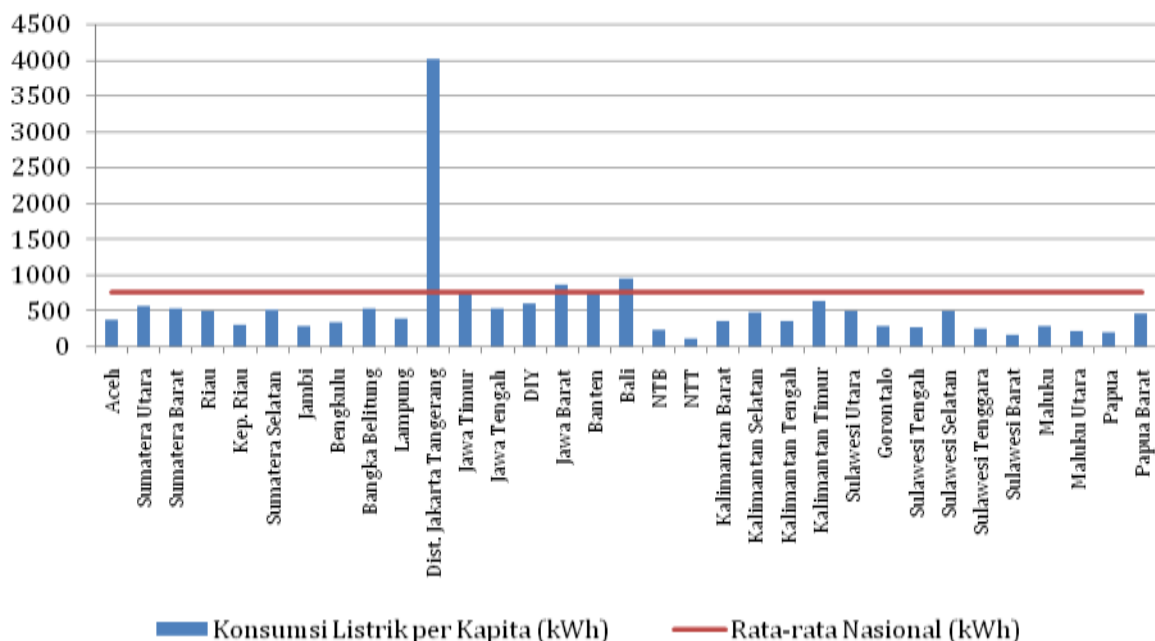
Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Jawa Tengah	2066	81	273	11	191	8	10	0	2540	100
Jawa Bali	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

Dari sisi kualitas, lebih dari 80 persen panjang jalan di Jawa Tengah sudah beraspal. Kondisi jalan provinsi dan kabupaten hanya 50 persen dalam kondisi baik. Tingginya tingkat kerusakan jalan menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal.

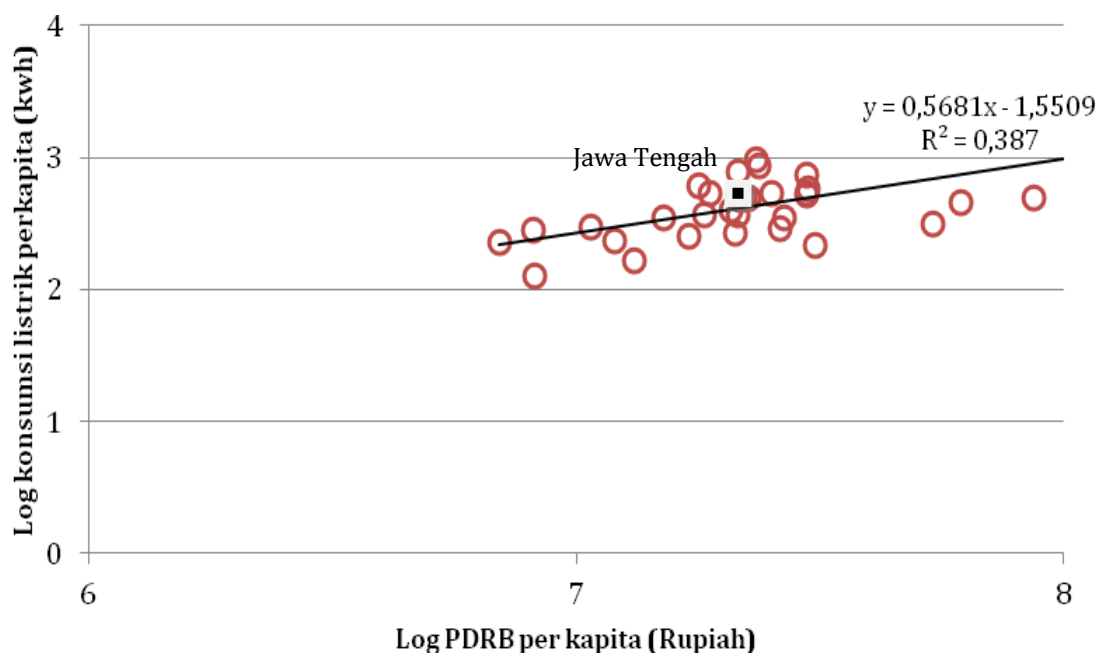
Gambar 12
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Jawa Tengah termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 12). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 13). Provinsi maupun wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Posisi Jawa Tengah berada di atas kurva linier, menunjukkan Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami defisiensi kelistrikan pada tahun 2013.

Gambar 13
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

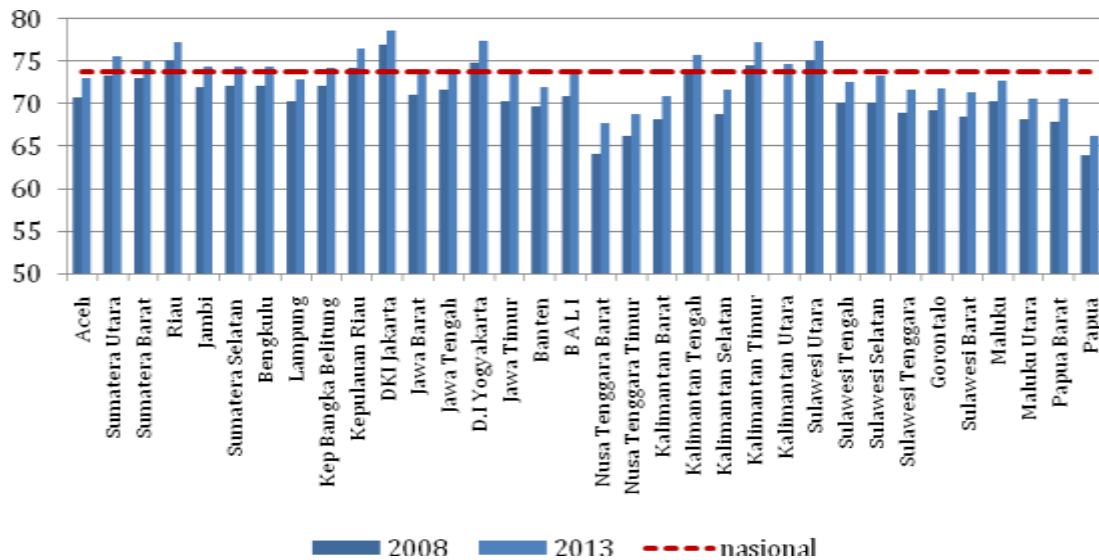


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Jawa tengah yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 14).

Gambar 14
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Jawa Tengah berada pada peringkat 16 secara nasional dengan nilai IPM sebesar 74,05 pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi sedikit perbaikan dari 71,1 tahun pada tahun 2008 menjadi 71,97 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah meningkat dari 6,86 tahun pada 2008 menjadi 7,43 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Jawa Tengah pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 89,24 menjadi 91,71 persen, lebih rendah dari capaian nasional 94,14 persen.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah juga terlihat lebih jelas dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA (SMU, SMK, Diploma, Universitas) meningkat dari sekitar 25,95 persen pada tahun 2008 menjadi 27,11 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014(Feb)	Perubahan
1	≤ SD	9.332.104	9.482.294	150.190
2	SMTp	3.326.748	3.430.424	103.676
3	SMTA Umum	3.300.849	3.642.894	342.045
5	Diploma I/II/III/Akademi	364.843	326.296	(38.547)
6	Universitas	770.487	834.511	64.024
	total	17.095.031	17.716.419	621.388

Sumber: BPS, 2014

6. Rendahnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Jawa Tengah ternyata lebih rendah dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Jawa Tengah tahun 2013 nilainya lebih besar dari satu, menunjukkan terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat (Tabel 9).

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Jawa tengah	179.320	216.962	1,21	0,69
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0.84	0.42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0.92	0.47

Sumber: BPS, 2013

Rasio PMTB terhadap simpanan di Jawa Tengah nilainya kurang dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Tengah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat

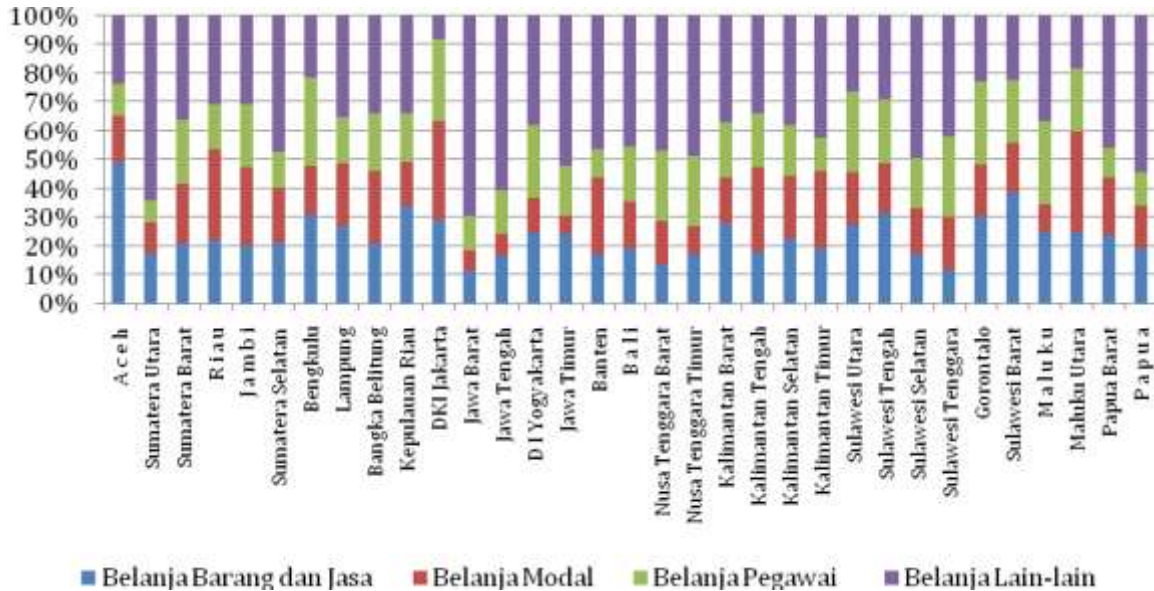
7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah. Rasio belanja modal di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 7,82 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 15,19 persen (Gambar 15). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah.

Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 15
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki. Indeks Gini yang mengukur tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,31 menjadi 0,39, Lebih rendah dari pencapaian nasional 0,35 menjadi 0,40. Tingkat kesenjangan yang rendah akan menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Percepatan pengembangan ekonomi Jawa diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,7 – 7,7 persen dapat tercapai. Selama tahun 2014 perekonomian Jawa Tengah meningkat secara spasial, yang tetap akan meningkat di tahun 2015. Faktor pendukung perekonomian Jawa Tengah terkait dengan potensi perbaikan ekspor manufaktur seiring dengan membaiknya ekonomi negara-negara mitra dagang utama di ASEAN.

2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 13,1 –9,5 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,35 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Jawa Tengah harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 4,85 poin persentase atau 0,81 poin persentase per tahun
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Jawa Tengah maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian;
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah.

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pengendalian konversi lahan pertanian;
- c. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- d. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- e. Perbaikan kualitas jaringan jalan;

- f. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- g. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- h. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

